BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desentralisasi fiskal disatu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi disisi lain memunculkan persoalan baru karena setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing-masing, sehingga menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah (Haryanto dan Adi, 2007) dalam Santosa, Budi (2013). Tidak hanya menimbulkan ketimpangan fiskal akan tetapi juga menimbulkan efek pada kesenjangan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sumber pembiayaan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, semestinya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi dalam realisasinya, Kuncoro (2004) dalam Santosa, Budi (2013) menemukan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) guna membantu daerah tersebut untuk menutupi ketimpangan kesenjangan keuangan yang terjadi di wilayahnya.

Dengan adanya transfer pendapatan dari pemerintah pusat tersebut diharapkan dapat memacu pemerintah daerah untuk mencapai kemandiriannya dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Simanullang, Gideon (2012), menyatakan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan

memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan fungsinya secara efektif. Untuk melaksanakan fungsi tersebut berikut data dukungan keuangan yang berasal dari dana transfer pusat ke daerah di Indonesia tahun 2010-2014.

Tabel 1.1
Realisasi Dana Transfer Ke Daerah di Indonesia
Tahun 2010 – 2014 (Dalam Milyar Rupiah)

Dana Tranfer Daerah	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Dana Perimbangan	316.711	347.246	411.293	430.354	491.883
• Dana Bagi Hasil	92.183	96.909	111.537	88.463	117.664
• Dana Alokasi Umum	203.572	225.534	273.814	311.139	341.219
• Dana Alokasi Khusus	20.956	24.803	25.941	30.752	33.000
Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian	28.016	64.079	69.352	82.906	104.621
Jumlah	344.727	411.325	480.645	513.260	596.504

Sumber : Data Olahan Badan Pusat Statistik, Tahun 2010-2014

Dari data tabel 1.1 tersebut diketahui bahwa perkembangan dana transfer ke daerah di Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 terus mengalami peningkatan, tecatat hingga tahun 2014 dana perimbangan yang ditransfer ke daerah berjumlah Rp.596.504 Triliun. Sidiq, Machfud (2002) menyatakan peningkatan yang cukup signifikan pada transfer dana ke daerah melalui dana perimbangan telah menyebabkan pengelolaan fiskal pemerintah pusat dalam pengelolaan fiskal pemerintahan secara umum telah berkurang. Sebaliknya proporsi pengelolaan fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya melalui APBD akan meningkat.

Decentralization Support Facility, (2010) menyatakan pada hakikatnya dana transfer antar pemerintahan pusat dan daerah dimungkinkan untuk

mengakomodasi masalah eksternalitas, kerjasama antar pusat dan daerah, bantuan dari daerah surplus ke daerah lainnya, serta mengakomodasi ketimpangan antar daerah. Semua itu dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi daerah seperti, mengurangi jumlah penduduk miskin, mendistribusikan pendapatan perkapita secara merata, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berikut data jumlah penduduk miskin di Indonesia Tahun 2010-2014.

Grafik l.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2010-2014
(Dalam Ribuan Jiwa)

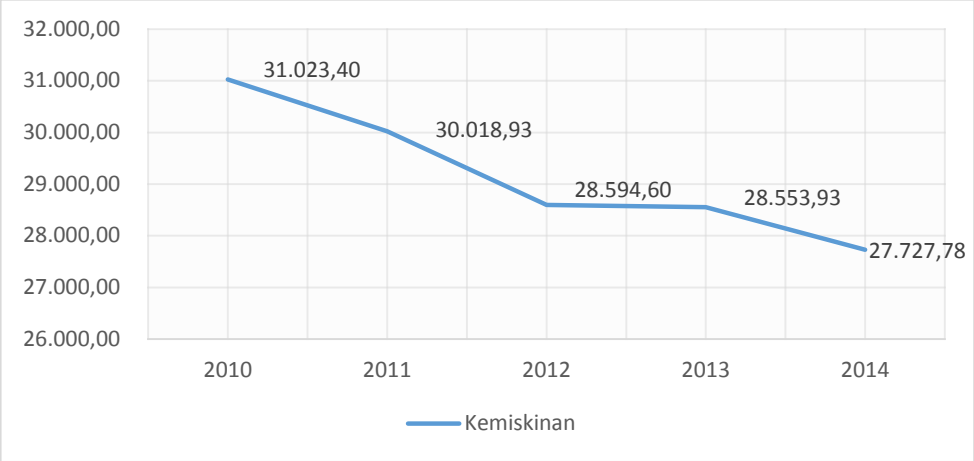

Sumber: Data olahan Badan Pusat Statistik, Tahun 2010-2014

Penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 terus mengalami penurunan, sebagaimana tampak pada grafik 1.1 dalam hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan sudah terwujud. Namun pengurangan tersebut belum menggambarkan realita yang sesungguhnya karena masih banyak daerah yang angka kemiskinannya berada di atas rata-rata angka kemiskinan nasional.

Grafik 1.2
PDRB Perkapita Provinsi Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2010 – 2014
(Ribu Rupiah)

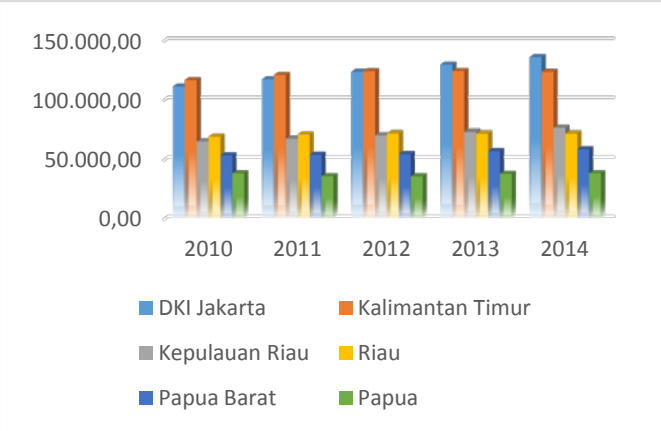

Sumber : Data Olahan Badan Pusat Statistik, Tahun 2010-2014

Selanjutnya perkembangan pendapatan perkapita di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 terus mengalami peningkatan, sebagaimana tampak pada grafik 1.2 berdasarkan data pendapatan perkapita Indonesia ternyata pendapatan nasional tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, hanya beberapa daerah tertentu saja yang memiliki pendapatan perkapita diatas rata-rata nasional. Restriardani (2011) menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi tidak hanya dalam bentuk perbedaan pendapatan dan kekayaan orang perorang, tetapi dapat berupa kesenjangan ekonomi atau pendapatan antar daerah kabupaten/ kota, provinsi dan negara. Perbedaan atau ketimpangan terjadi akibat adanya distribusi pendapatan yang tidak merata dan terkonsentrasi pada wilayah tertentu saja.

Grafik 1.3
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Menurut Harga Konstan 2010
Di Indonesia Tahun 2010 – 2014 (%)

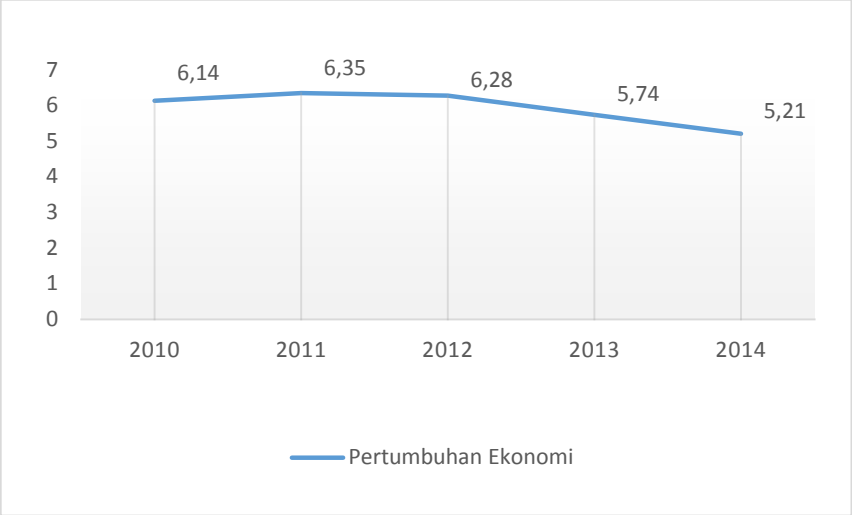

Sumber : Data Olahan Badan Pusat Statistik, Tahun 2010-2014

Sementara itu rata-rata pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi di Indonesia mengalami pergerakan positif pada tahun 2010 – 2011 dan pergerakan yang negatif di tahun 2012-2014, hal ini menggambarkan bahwa telah terjadi pelemahan perekonomian di Indonesia dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

(Wahidin dkk, 2012) menyatakan konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah, ekonomi dari daerah dengan konsentrasi tinggi cenderung tumbuh pesat, sedangkan daerah yang tingkat konsentrasi ekonomi rendah cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Oleh sebab itu dana transfer yang terus meningkat setiap tahun semestinya mendapat respon positif dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayahnya. Akan tetapi

dalam perkembangannya dana transfer belum mampu mendorong perekonomian nasional.

Grafik 1.4
Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia
Tahun 2010-2014

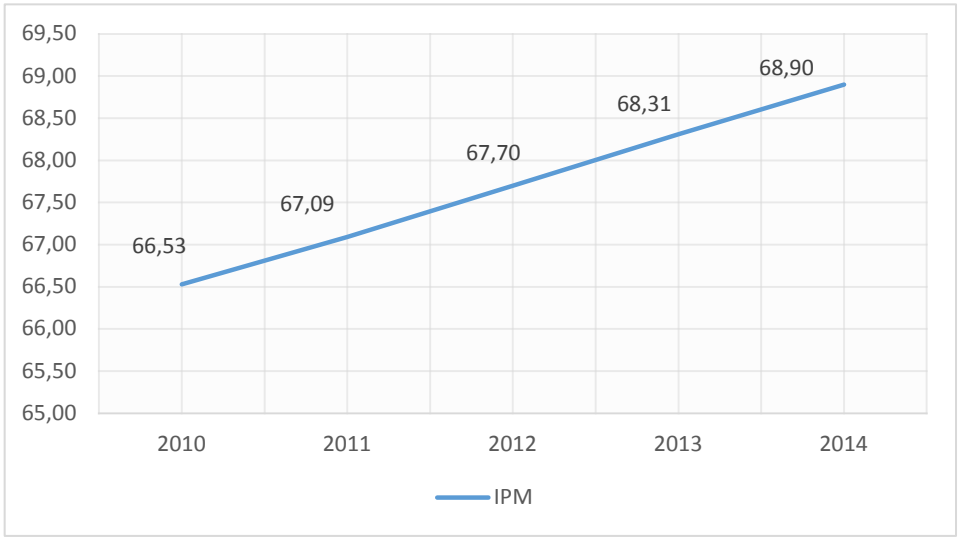

Sumber: Data Olahan Badan Pusat Statistik, Tahun 2010-2014

Berdasarkan grafik 1.4 terakhir angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, akan tetapi peningkatan tersebut tidak menggambarkan potret pembangunan sumber daya manusia yang sesungguhnya, karna masih banyak provinsi di Indonesia yang angka IPMnya berada di bawah rata-rata IPM Nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi pemasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah realisasi dana transfer daerah dalam APBN yang terdiri dari DBH, DAU, DAK, mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Indonesia

2. Apakah realisasi dana transfer daerah dalam APBN yang terdiri dari DBH, DAU, DAK, mempengaruhi pendapatan perkapita di Indonesia
3. Apakah Realisasi dana transfer daerah dalam APBN yang terdiri dari DBH, DAU, DAK, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia
4. Apakah realisasi dana transfer daerah dalam APBN yang terdiri dari DBH, DAU, DAK, mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh realisasi dana Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), terhadap pendapatan perkapita di Indonesia
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh realisasi dana Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap pendapatan perkapita di Indonesia
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), terhadap pendapatan perkapita di Indonesia
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh realisasi dana Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
9. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
10. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia
11. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh realisasi dana Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia
12. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana transfer daerah terhadap indikator disparitas pembangunan ekonomi di Indonesia. Secara khusus penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis:

a. Bagi Pemerintah
    1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau informasi bagi pemerintah pusat sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dana transfer pada masa yang akan datang dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia

b. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan referensi bagi pihak akademis dalam melakukan penelitian selanjutnya sehingga diperoleh hasil yang lebih baik dalam melakukan proses penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapakan dapat memberikan pemahaman yang dianggap tepat kepada masyarakat agar memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pencapaian sasaran pelaksanaan pembangunan.